



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI
DANA GAMPONG BAGI GAMPONG-GAMPONG
DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Gampong bagi Gampong-Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 8);
16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 33);
17. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 337);

18. Peraturan Bupati.....

18. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 226) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 254.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI DANA GAMPONG BAGI GAMPONG-GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa atau Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Nagan Raya.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
6. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disingkat DPMGP4 adalah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten yang bertugas menyelenggarakan pendampingan dan pembinaan Gampong.
8. Kecamatan.....

8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
9. Camat adalah Camat di Kabupaten Nagan Raya.
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.
11. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong, mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong, atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
14. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
18. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
19. Aparat

19. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Auditor, Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu pada Inspektorat yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

BAB II

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADG

Pasal 2

- (1) ADG merupakan alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Gampong yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dalam APBK setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Besaran Alokasi ADG yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten dalam APBK Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp51.090.634.800,- (lima puluh satu milyar sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) ADG diprioritaskan untuk membiayai Penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong.

Pasal 3

- (1) Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong ditetapkan berdasarkan kebutuhan Penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong.
- (2) Perhitungan ADG setiap Gampong dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{ADG}_x &= \sum \text{PTKPG} \\ \text{ADG}_x &= \text{Alokasi Dana Gampong setiap Gampong} \\ \sum \text{PTKPG} &= \text{Jumlah Penghasilan Tetap Keuchik +} \\ &\quad \text{Jumlah Penghasilan Tetap Perangkat} \\ &\quad \text{Gampong dalam 1 tahun} \end{aligned}$$

PTKPG = Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong

PG = Perangkat Gampong (Sekretaris Gampong, Kasi, Kaur dan Kadus)

(3) Daftar

- (3) Daftar Rincian pembagian ADG bagi Gampong-Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021 tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. tahap III pada bulan September sebesar 25%(dua puluh lima perseratus);dan
 - d. tahap IV pada bulan Nopember sebesar 25% (dua puluh lima perseratus.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan setelah Keuchik menyampaikan.
 - a. permohonan Keuchik;
 - b. rekomendasi Camat;
 - c. surat Tanda Terima Tranfer (ST4);
 - d. rencana penggunaan dana; dan
 - e. laporan Realisasi Penggunaan dana.
- (4) Atas dasar kelengkapan berkas administrasi yang disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati, maka Bupati melalui DPMGP4 menerbitkan surat permohonan/telaah penyaluran ADG kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk dilakukan penyaluran ADG.
- (5) Untuk Pencairan maka Bupati melalui DPMGP4 menerbitkan surat Rekomendasi kepada Gampong untuk melakukan pencairan sesuai tahapan

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (3) Daftar Rincian pembagian ADG bagi Gampong-Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021 tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan secara bertahap :
- tahap I pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - tahap III pada bulan September sebesar 25%(dua puluh lima perseratus);dan
 - tahap IV pada bulan Nopember sebesar 25% (dua puluh lima perseratus.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan setelah Keuchik menyampaikan.
- permohonan Keuchik;
 - rekomendasi Camat;
 - surat Tanda Terima Tranfer (ST4);
 - rencana penggunaan dana; dan
 - laporan Realisasi Penggunaan dana.
- (4) Atas dasar kelengkapan berkas administrasi yang disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati, maka Bupati melalui DPMGP4 menerbitkan surat permohonan/telaah penyaluran ADG kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk dilakukan penyaluran ADG.
- (5) Untuk Pencairan maka Bupati melalui DPMGP4 menerbitkan surat Rekomendasi kepada Gampong untuk melakukan pencairan sesuai tahapan

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilaksanakan sebelum rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
- (4) Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADG dilakukan dengan ketentuan :

- a. Keuchik wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan ADG tahun sebelumnya paling lambat pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG pada setiap tahap penyaluran dana yang telah digunakan; dan
- c. Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG tahap I, II, III dan IV kepada Bupati Nagan Raya Cq. DPMGP⁴ Kabupaten Nagan Raya.

BAB IV SANKSI

Pasal 8

- (1) Bupati menunda penyaluran ADG dan dalam hal Keuchik tidak menyampaikan APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan telah disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan sebelumnya.

(3) Bupati

- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADG dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA ADG yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADG yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADG yang diterima Gampong.
- (5) Pengurangan ADG dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN VERIFIKAS
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengendali pengelolaan Dana.
- (2) Pembinaan dilakukan secara berjenjang dimulai dari Kecamatan dan kabupaten.
- (3) Pembinaan dilakukan secara berjenjang dimulai dari Kecamatan dan kabupaten.
- (4) Kegiatan pembinaan dapat berupa pelatihan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADG.
- (5) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi Dana ADG dilaporkan kepada Bupati secara pertahapan pencairan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Dana ADG dilakukan oleh Tuha Peut Gampong.
- (2) Aparat pengawasan fungsional daerah sewaktu waktu dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan Dana ADG dan PDRD atas perintah Bupati.
- (3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainya dapat melakukan pengawasan terhadap Dana ADG atas sepengetahuan Bupati

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Verifikasi

Pasal 11

- (1) Verifikasi atas Dokumen Dana ADG dilakukan oleh Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Untuk penetapan Tim Verifikasi di tingkat Kabupaten terdiri dari Kepala DPMGP4, Sekretaris, Kabid, Kasubbid dan Tenaga Ahli yang diajukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan Tim Verifikasi di tingkat Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kasi PMD, Staf dan Pendamping Desa yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- (4) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap Dana ADG atas sepengetahuan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 12

- (1) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari ADG harus dicantumkan dalam papan pengumuman di Gampong, sehingga masyarakat Gampong dapat mengetahui informasi dan dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADG berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana ADG.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus berdasarkan musyawarah dan persetujuan Bupati

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 14 Januari 2021 M
| Jumadil Akhir 1442 H

 BUPATI NAGAN RAYA, 

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 15 Januari 2021 M
| Jumadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, 


ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 394

**DAFTAR PERHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG- BAGI GAMPONG-GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KEC	GAMPONG	Keuchik	1 TAHUN	Sekdes	1 TAHUN	Kasi	1 TAHUN	Kaur	1 TAHUN	Kadus	1 TAHUN	Jumlah total kebutuhan	
				2.426.640		2.224.420		2.022.200		2.022.200		1.624.750		
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1	KUALA	1	LAWA BATU	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
2		2	JOGJA	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
3		3	UJONG SIKUNENG	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
4		4	BLANG MUKO	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	5	97.485.000	274.629.720
5		5	PULO IE	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
6		6	PURWOREJO	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
7		7	BLANG BARO	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
8		8	ALUE IE MAMEH	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	5	97.485.000	274.629.720
9		9	UJONG PASI	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
10		10	SIMPANG PEUT	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	3	72.799.200	6	116.982.000	318.393.120
11		11	BLANG TEUNGOH	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	3	72.799.200	3	58.491.000	259.902.120
12		12	UJONG PADANG	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	3	72.799.200	4	77.988.000	279.399.120
13		13	COT KUMBANG	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	3	72.799.200	4	77.988.000	279.399.120
14		14	BLANG BINTANG	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
15		15	UJONG PATIHAN	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	3	72.799.200	8	155.976.000	357.387.120
16		16	KUTA MAKMUE	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
17		17	GUNONG REUBO	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720

18	SEUNAGAN	1	JEURAM	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
19		2	PANTE CEUREUMEN	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
20		3	KUTA BARO JEURAM	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
21		4	PAROM	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
22		5	PEUREULAK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
23		6	KUTA SAYEH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
24		7	BLANG BARO	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
25		8	PADANG	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
26		9	ALUE THO	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
27		10	LHOK PAROM	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
28		11	SAPEK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
29		12	ALUE DODOK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
30		13	COT KUMBANG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
31		14	KUTA KUMBANG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
32		15	NIGAN	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
33		16	GAMPONG COT	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
34		17	BLANG PATEUK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
35		18	BLANG PUUK NIGAN	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
36		19	KRUENG CEH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
37		20	BANTAN	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
38		21	COT LHE LHE	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
39		22	RAMBONG RAYEUK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
40		23	PAYA UDEUNG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320

41		24	ALUE BULOH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
42		25	KUTA PAYA	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
43		26	KRUENG CEUKO	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
44		27	LHOK PADANG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
45		28	KUTA ACEH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
46		29	KRUENG MANGKOM	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
47		30	LATONG	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
48		31	PAYA UN DAN	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
49		32	BLANG PUUK KULU	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
50		33	BLANG MURONG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
51		34	KULU	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
52		35	RAMBONG CUT	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
53	SEUNAGAN TIMUR	1	BLANG PENYANG	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
54		2	MEUGAT MEH	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
55		3	LHOK PANGE	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
56		4	BLANG LANGO	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
57		5	TUWI MEULEUSONG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
58		6	BLANG GEUDONG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
59		7	BLANG TEUNGKU	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
60		8	SAWANG MANE	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
61		9	KEUDE NEULOP	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
62		10	KILA	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
63		11	KANDEH	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720

64		12	COT GUD	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
65		13	KABU BAROH	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
66		14	KABU TUNONG	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
67		15	KEUDE LINTEUNG	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
68		16	MEURANDEH SUAK	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
69		17	UTEUN PULO	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
70		18	COT MANYANG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
71		19	PULO TEUNGOH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
72		20	COT DIRUI	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
73		21	COT TEUKU DEK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
74		22	SAPENG	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
75		23	PEULEUKJUNG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
76		24	PAYA	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
77		25	BLANG PREH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
78		26	BLANG ARA KEUDE	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
79		27	BLANG ARA GAMPONG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
80		28	IE BEUDOH	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
81		29	BLANG BAYU	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
82		30	MON BATEUNG	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
83		31	SUAK PEUREUBONG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
84		32	KRUENG KULU	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
85		33	COT PUNTI	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	2	38.994.000	216.138.720
86		34	LHOK MESJID	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720

87	BEUTONG	1	BLANG SEUNONG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
88		2	PANTE ARA	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
89		3	GUNONG NAGAN	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
90		4	TUWI BUNTA	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
91		5	BLANG MESJID	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
92		6	BLANG NEUANG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
93		7	PANTON BAYAM	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
94		8	BLANG BARO P. RAGA	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
95		9	KRUENG CUT	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
96		10	BLANG LEUMAK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
97		11	BABAH KRUENG	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
98		12	BLANG SEUMOT	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
99		13	LHOK SEUMOT	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	5	97.485.000	250.363.320
100		14	MEUNASAH PANTE	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
101		15	KUTA JEUMPA	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
102		16	BLANG DALAM	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
103		17	KEUDE SEUMOT	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
104		18	BLANG BARO RAMBONG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	6	116.982.000	269.860.320
105		19	UJONG BLANG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
106		20	MEUNASAH KRUENG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
107		21	MEUNASAH DAYAH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
108		22	MEUNASAH TEUNGOH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
109		23	KULAM JERNEH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320

110		24	BUMI SARI	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
111	DARUL MAKMUR	1	LAMIE	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	5	97.485.000	250.363.320
112		2	KUTA TRIENG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
113		3	GELANGGANG GAJAH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
114		4	KAYEE UNOE	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
115		5	BLANG BARO	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
116		6	ALUE BILIE	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	3	72.799.200	4	77.988.000	279.399.120
117		7	SUKA RAJA	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
118		8	GUNONG CUT	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
119		9	SUKA JADI	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
120		10	TUWI BUYA	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
121		11	UJONG LAMIE	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
122		12	SUAK PALEMBANG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
123		13	ALUE WAKI	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	6	116.982.000	269.860.320
124		14	ALUE GEUTAH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
125		15	KRUENG ALEM	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	6	116.982.000	294.126.720
126		16	ALUE RAMBOT	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
127		17	KRUENG SEUMANYAM	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	5	97.485.000	250.363.320
128		18	PULO TEUNGOH	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
129		19	KARANG ANYER	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	6	116.982.000	294.126.720
130		20	KUALA SEUMANYAM	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
131		21	PULO IE	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
132		22	PULO KRUEK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320




133		23	ALUE KUYUN	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
134		24	ALUE RAYA	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	7	136.479.000	289.357.320
135		25	ALUE JAMPAK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
136		26	SUKA MULIA	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
137		27	SIMPANG DUA	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
138		28	SIDO JADI	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
139		29	SERBA JADI	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
140		30	SERBA GUNA	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
141		31	SP. DELI KILANG	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	6	116.982.000	294.126.720
142		32	PANTON BAYU	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
143		33	UJONG TANJONG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
144		34	SUKA RAMAI	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	5	97.485.000	274.629.720
145		35	LADANG BARO	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
146		36	ALUE BATEUNG BROK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
147		37	SP. DELI KAMPONG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
148		38	BLANG LUAH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
149		39	SUMBER MAKMUR	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
150		40	MAKARTI JAYA	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
151	SUKA MAKMUE	1	LUENG BARO	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	5	97.485.000	274.629.720
152		2	ALUE KAMBUK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
153		3	KUTA PADANG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
154		4	SUAK BILIE	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
155		5	MACAH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320

156		6	SEUMAMBEK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
157		7	COT KUTA	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
158		8	KABU BLANG SAPEK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
159		9	COT PEURADI	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
160		10	BLANG SAPEK	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
161		11	LHOK BEUTONG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
162		12	GAMPONG TEUNGOH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
163		13	LHOK RAMEUAN	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
164		14	BLANG MULING	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
165		15	KRAK TAMPAL	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
166		16	MEUREUBO	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
167		17	KUTA BARO BLANG MULING	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
168		18	ALUE PEUSAJA	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
169		19	ALUE GAJAH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
170	KUALA PESISIR	1	SUAK PUNTONG	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	3	72.799.200	4	77.988.000	279.399.120
171		2	GAMPONG LHOK	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
172		3	KUALA BARO	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	3	72.799.200	3	58.491.000	259.902.120
173		4	PADANG RUBEK	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	3	72.799.200	4	77.988.000	279.399.120
174		5	PULO	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
175		6	LANGKAK	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	3	72.799.200	4	77.988.000	279.399.120
176		7	KUALA TUHA	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	3	72.799.200	3	58.491.000	259.902.120
177		8	KUBANG GAJAH	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	3	72.799.200	3	58.491.000	259.902.120
178		9	KUALA TRANG	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	3	72.799.200	6	116.982.000	318.393.120

179		10	COT RAMBONG	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
180		11	PADANG PANYANG	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	3	72.799.200	4	77.988.000	279.399.120
181		12	ARONGAN	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
182		13	JATI REJO	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	3	72.799.200	3	58.491.000	259.902.120
183		14	PURWODADI	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	5	97.485.000	274.629.720
184		15	LEUNG TEUKU BEN	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	3	72.799.200	3	58.491.000	259.902.120
185		16	PURWOSARI	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
186	TADU RAYA	1	ALUE BATA	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	5	97.485.000	250.363.320
187		2	GUNONG SAPEK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
188		3	SARAH MANTOK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
189		4	PASIE LUAH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
190		5	GUNONG GEULUGO	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
191		6	GUNONG KEUPOK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
192		7	GUNONG PUNGKI	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	5	97.485.000	274.629.720
193		8	ALUE SIRON	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
194		9	COT MUE	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720
195		10	BABAH ROT	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
196		11	BABAH DUA	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	5	97.485.000	250.363.320
197		12	BATU RAJA	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	5	97.485.000	274.629.720
198		13	SIMPANG JAYA	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	3	58.491.000	235.635.720

199		14	SUMBER DAYA	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	5	97.485.000	250.363.320
200		15	RANTO SELAMAT	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	5	97.485.000	274.629.720
201		16	ALUE SEUPEUNG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
202		17	KRUENG ITAM	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	5	97.485.000	274.629.720
203		18	ALUE GAJAH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
204		19	ALUE LABU	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
205		20	GAPA GARU	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.994.000	191.872.320
206		21	KUALA TADU	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	4	77.988.000	255.132.720
207		22	COT MEE	1	29.119.680	1	26.693.040	3	72.799.200	2	48.532.800	5	97.485.000	274.629.720
208	TRIPA MAKMUR	1	KUALA TRIPA	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	5	97.485.000	250.363.320
209		2	BABAH LUENG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
210		3	DRIEN TUJOH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	5	97.485.000	250.363.320
211		4	LUENG KEUBE JAGAT	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
212		5	KABU	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
213		6	PASIE KEUBE DOM	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
214		7	NEUBOK YEE PK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
215		8	NEUBOK YEE PP	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
216		9	MON DUA	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320

217		10	UJONG KRIENG	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
218		11	PANTON PANGE	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
219	BEUTONG ATEUH BANGGALANG	1	BLANG PUUK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	4	77.988.000	230.866.320
220		2	BABAH SUAK	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
221		3	KUTA TEUNGOH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	3	58.491.000	211.369.320
222		4	BLANG MEURANDEH	1	29.119.680	1	26.693.040	2	48.532.800	2	48.532.800	2	38.997.360	191.875.680
				222	6.464.568.960	222	5.925.854.880	529	12.836.925.600	460	11.162.544.000	754	14.700.741.360	51.090.634.800


BUPATI NAGAN RAYA


M. JAMIN IDHAM